

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih atas kasih, rahmatNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 telah dapat disusun.

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga factor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Harapan kami semoga LAKIP ini dapat bermanfaat baik bagi DPPKAD untuk mencapai perbaikan terus menerus, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan kinerja DPPKAD Kabupaten Purbalingga

Purbalingga, Januari 2013
KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

YANUAR ABIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1 032

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga yang disingkat DPPKAD pada saat ini merupakan hasil pengkajian kelembagaan dan penataan kembali Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Purbalingga.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 13 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Purbalingga (Pasal 35) DPPKAD merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPPKAD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati

Sejalan dengan diselenggarakannya azas desentralisasi/otonomi secara utuh dan bulat diletakkan di daerah Kabupaten/Kota menimbulkan permasalahan meningkatnya kebutuhan pelayanan public dari waktu kewaktu seiring dengan bertambahnya penduduk menyebabkan beban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Purbalingga menjadi semakin besar termasuk bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sesuai dengan keterbatasan anggaran dan cakupan kewenangan serta fungsi yang ada, DPPKAD Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 3 (tiga) Program yang terdiri dari 18 kegiatan. Secara umum hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan DPPKAD Kabupaten Purbalingga pada tahun 2012 adalah baik.

Untuk melaksanakan misi dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

A. TUJUAN

- a. Melaksanakan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset daerah secara profesional.
- b. Melaksanakan tertib administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c. Meningkatkan profesionalisme pegawai untuk mendukung peningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah.

- d. Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk melaksanakan pelayanan prima.

B. SASARAN

- a. Terwujudnya analisis kemampuan daerah berdasarkan analisis pendapatan, kebutuhan dan beban kerja.
- b. Terwujudnya pegawai yang berpengetahuan terampil dan profesional.
- c. Terwujudnya kesederhanaan prosedur layanan secara mudah, cepat dan tepat sasaran.
- d. Terwujudnya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Tersusunnya bahan laporan keuangan daerah
- f. Terkendalinya sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- g. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang daerah

Indikator kinerja sasaran :

- a. Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor
- b. Terlaksananya rapat koordinasi
- c. Terpeliharanya Sarpras kantor
- d. Terpenuhinya kebutuhan sarpras kantor
- e. Terlaksananya sistem akuntabilitas SKPD
- f. Terlaksananya diklat pegawai
- g. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran tepat waktu
- h. Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan APBD
- i. Terlaksananya pelayanan Keuangan terhadap SKPD
- j. Terselenggaranya penyaluran dana
- k. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
- l. Tersusunnya LKPD Th 2012
- m. Terkelolanya aset daerah
- n. Tercapainya target PAD
- o. Tercapainya target PBB 2013

Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga antara lain:

1. Kepatuhan, ketaatan, kejujuran dan Tax Dicipline sebagian Wajib Pajak / Wajib Retribusi relatif masih kurang ;
2. Kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak atau Retribusi Daerah masih kurang ;
3. Jumlah Pegawai / petugas pemungut pajak belum memadai (masih kurang)

4. Data potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang teradministrasi masih belum sesuai dengan kondisi riilnya;
5. Pengelolaan Keuangan Daerah pada tiap-tiap SKPD belum tertib sehingga pengadministrasian pengelolaan keuangan belum mencapai hasil yang optimal;
6. Aset Daerah saat ini belum secara optimal dikelola dengan baik ;
7. Belum tersusunnya regulasi secara lengkap di bidang pendapatan, aset dan kebijakan akuntansi

Upaya atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi daerah kepada wajib pajak/retribusi untuk meningkatkan kepatuhan , ketaatan, kejujuran dan kedisiplinan dalam membayar pajak/retribusi
- b. Sosialisasi yang berkelanjutan tentang Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar taat dan patuh pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Meningkatkan pembekalan dan memberdayakan aparat / petugas yang ada melalui pelatihan/kursus, study banding serta pembinaan lain yang bersifat pemberian motivasi kerja dan mengusulkan penambahan jumlah pegawai pemungut pajak ;
- d. Memperbaiki dan menyempurnakan data potensi pajak dan retribusi daerah disesuaikan dengan kondisi riil
- e. Melaksanakan sosialisasi, Bintek serta Asistensi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada masing-masing SKPD
- f. Melaksanakan Inventarisasi
- g. Melengkapi regulasi di bidang pendapatan, aset dan akuntansi

Dalam rangka mengantisipasi kendala atau hambatan yang mungkin terjadi di tahun 2013 ini, langkah antisipatif yang dilakukan melalui ;

1. penyusunan konsep perencanaan kegiatan yang lebih matang dan mendasarkan pada potensi riil,
2. mengoptimalkan potensi sumberdaya internal secara nyata,
3. meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
4. memperkuat landasan kerja dari aspek hukum dengan jalan senantiasa meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

5. memberdayakan aspirasi dan partisipasi stake holder bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai mitra kerja dinas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Purbalingga, Januari 2013

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

YANUAR ABIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1 032

BAB I PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat DPPKAD Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPPKAD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga dan pada akhir tahun 2010 diadakan penataan kembali satuan-satuan kerja perangkat daerah .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga DPPKAD Kab. Purbalingga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD) Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
2. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. pelaksanaan program kerja di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
6. penelitian dan pengesahan dokumen anggaran;
7. pengendalian pelaksanaan APBD;
8. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis sistim penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
9. pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah;

10. pemungutan pajak daerah;
11. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistim penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
12. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD yang melalui Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
13. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban APBD;
14. pengaturan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
15. pengelolaan utang dan piutang daerah;
16. pelaksanaan sistim akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
17. pelaksanaan penyajian informasi keuangan daerah;
18. pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
19. pelaksanaan koordinasi pemungutan penerimaan daerah;
20. perumusan kebijakan di bidang perpajakan dan retribusi daerah;
21. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
22. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan,perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan;
23. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Susunan Organisasi DPPKAD terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Pendapatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - b. Seksi Pendapatan Daerah Lainnya
4. Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Anggaran
 - b. Seksi Perimbangan Keuangan
5. Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari:
 - a. Seksi Perbendaharaan

- b. Seksi Kas Daerah
- c. Seksi Akuntansi
- 6. Bidang Aset terdiri dari :
 - a. Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
 - b. Seksi Penatausahaan Aset
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- 8. UPTD

Sebagai tindak lanjut dengan telah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPPKAD Kabupaten Purbalingga didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah digantii dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Undang-undan No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
6. Instruksi Persiden Nomor 7 Tahun 1999 tengtang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Purbalingga ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPPKAD Kabupaten Purbalingga mengacu Renstra Tahun 2011-2015 yang memuat visi-misi DPPKAD Kabupaten Purbalingga yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

D. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja DPPKAD Kabupaten Purbalingga selama tahun 2012. Capaian Kinerja (performance results) 2012 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (performace plan) tahun 2012 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan DPPKAD Kabupaten Purbalingga. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPPKAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 adalah sebagai berikut

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, dan ruang lingkup LAKIP Tahun 2012.

BAB II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, menjelaskan visi misi, Faktor Penentu Keberhasilan, Tujuan dan Sasaran, Program Kerja dan kegiatan DPPKAD Kabupaten Purbalingga.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, dan Analisis Pencapaian Kinerja yang membahas Sasaran, dan masing-masing sasaran tersebut pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan terakhir membahas Aspek Keuangan.

BAB IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPPKAD Kabupaten

Purbalingga Tahun 2012 ini dan sasaran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2011 – 2015 bertujuan untuk mendorong terwujudnya Visi dan terlaksananya Misi DPPKAD Kabupaten Purbalingga serta untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga.

a. Visi Misi

1. Visi

“PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN DINAMIS”

2. Misi

- 1.** Merumuskan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2.** Melaksanakan tertib administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 3.** Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. Faktor Penentuan Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan adalah faktor-faktor yang ada dalam organisasi maupun yang berada diluar organisasi yang keberadaannya akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor tersebut antara lain :

- 1.** Perangkat perundang-undangan yang mendukung ;
- 2.** Kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme aparatur;
- 3.** Kelembagaan dan manajemen pemerintahan.

c. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan untuk jangka waktu satu sampai lima tahun. Sejalan dengan visi dan misi, tujuan DPPKAD Kabupaten Purbalingga yang telah dirumuskan adalah :

- a. Melaksanakan pendapatan ngelolaan keuangan dan aset daerah secara profesional guna mewujudkan kemampuan daerah.
 - b. Melaksanakan tertib administrasi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - c. Meningkatkan profesionalisme pegawai untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah serta peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah.
 - d. Mewujudkan optimalisasi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk melaksanakan pelayanan prima.
2. Sasaran
- a. Terwujudnya analisis kemampuan daerah berdasarkan analisis pendapatan, kebutuhan dan beban kerja.
 - b. Terwujudnya pegawai yang berpengetahuan, terampil dan profesional
 - c. Terwujudnya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur pelayanan administrasi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal.
 - d. Tersusunnya bahan laporan keuangan daerah
 - e. Terkendalinya sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
 - f. Terwujudnya kesederhanaan prosedur pelayanan administrasi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara mudah, cepat dan tepat sasaran.

B. Penetapan Kinerja

Program yang ditempuh untuk menjabarkan sasaran dalam rangka pelaksanaan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah ;

Kegiatan yang dilaksanakan

1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
6. Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, RENJA, RENSTRA dan LK-SKPD

b. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Penyusunan APBD
2. Penyusunan Perubahan APBD
3. Penyusunan Sistem dan Prosedur Tata Usaha Keuangan
4. Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah
5. Fasilitasi Kegiatan Perimbangan Keuangan
6. Pembinaan Berkala Bendahara Daerah
7. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
8. Pengelolaan Aset Daerah
9. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah

c. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Penunjang Keberhasilan PBB dan BPHTB
3. Persiapan Penyerahan Pengelolaan PBB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan. Dalam semangat transparansi seperti itulah, Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan /program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Kriteria pengukuran kinerja secara umum yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut :

<u>No.</u>	<u>Rentang Capaian</u>	<u>Kategori Capaian</u>
1.	Lebih dari 90 %	Sangat Baik
2.	70 % sampai dengan 89,99 %	Baik
3.	55 % sampai dengan 69,99 %	Cukup
4.	Kurang dari 54,99 %	Kurang

Kinerja DPPKAD Kabupaten Purbalingga tahun 2012 sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja tahun 2012 sebagai berikut :

1. Sasaran Terwujudnya analisis kemampuan daerah berdasarkan analisis pendapatan, kebutuhan dan beban kerja. serta sasaran terwujudnya pegawai yang berpengetahuan, terampil dan profesional.

Sasaran ini dicapai melalui program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah yang didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- 1) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
- 2) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 4). Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 5). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- 6). Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, RENJA, RENSTRA dan LK-SKPD

2. Sasaran terwujudnya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur pelayanan administrasi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal, tersusunya bahan laporan keuangan daerah serta terkendalinya sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah

Sasaran ini dicapai melalui program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- 1). Penyusunan APBD
- 2). Penyusunan Perubahan APBD
- 3). Penyusunan Sistem dan Prosedur Tata Usaha Keuangan
- 4). Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah
- 5). Fasilitasi Kegiatan Perimbangan Keuangan
- 6). Pembinaan Berkala Bendahara Daerah
- 7). Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
- 8). Pengelolaan Aset Daerah
- 9). Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah

3. Sasaran Terwujudnya kesederhanaan prosedur pelayanan administrasi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara mudah, lancar dan tepat sasaran. serta terlaksananya optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah

Sasaran ini dicapai melalui program Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah yang didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- 1). Intensifikasi dan ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 2). Penunjang Keberhasilan PBB dan BPHTB
- 3). Persiapan Penyerahan Pengelolaan PBB

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi	%
Terwujudnya analisis kemampuan daerah berdasarkan analisis pendapatan, kebutuhan dan beban kerja serta Terwujudnya pegawai yang berpengetahuan, terampil dan profesional	Terpenuhinya kebutuhan, bahan dan jasa kantor Terlaksananya rapat koordinasi Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Terpenuhinya kebutuhan Sarpras Kantor Terlaksananya sistem Akuntabilitas SKPD Terlaksananya diklat pegawai	1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kegiatan :		2.010.975.000	1.739.822.421	86,52
		a..Penyediaan Bahan dan jasa Perkantoran	73 orang	Rp 1.091.344.000	Rp 997.685.621	91,42
		b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	205 kali	Rp 137.655.000	Rp 73.441.700	53,35
		c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 paket	Rp 567.456.000	Rp 506.619.900	86,24
		d. Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	1 paket	Rp 164.320.000	Rp 142.483.200	86,71
		e. Penyusunan LAKIP LPPD,LKPJ,RENJA RENSTRA DAN LK-SKPD	20 buku	Rp 5.200.000	Rp 5.199.000	99,98
		f. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	8 orang	Rp 25.000.000	Rp 14.393.000	57,57
Terwujudnya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur pelayanan administrasi pendapatan <i>pengelolaan</i> keuangan daerah Terwujudnya bahan laporan keuangan daerah serta Terkendalinya sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Tersedianya dokumen perencanaan anggaran tepat waktu Jumlah temuan kekeliruan/penyimpangan pengelolaan administrasi keuangan daerah Rata-rata lama waktu penerbitan SP2D Terwujudnya hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian	2. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kegiatan :		2.264.701.000	2.122.246.527	93,71
		a. Penyusunan APBD	100 bk	Rp 268.072.000	Rp 262.246.150	97,83
		b. Penyusunan Perubahan APBD	100 bk	Rp 258.060.000	Rp 255.304.000	98,93
		c. Penyusunan Sisdur Tata Usaha Keuangan	250 bk	Rp 42.500.000	Rp 37.332.200	87,84
		d. Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah	176 SKPD	Rp 237.964.000	Rp 236.661.500	99,45
		e. Fasilitasi Kegiatan Perimbangan Keuangan	1 paket	Rp 80.714.000	Rp 76.535.000	94,82
		f. Pembinaan Berkala Bendahara Daerah	182 orang	Rp 38.045.000	Rp 34.715.000	91,25
		g. Penyusunan Laporan Keuangan	87 set buku	Rp 337.041.000	Rp 328.674.900	97,52
		h. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah	183 orang	Rp 45.870.000	Rp 41.773.500	91,07

Terwujudnya kesederhanaan prosedur layanan secara mudah, lancar dan tepat sasaran	Terkelolanya Aset Daerah	i. Pengelolaan Aset daerah	176 SKPD	Rp 956.435.000	Rp 849.003.777	88,77
		Aset Tetap :	Rp. 9.011.008.239			
		- Tanah	Rp. 4.033.327.915			
		- Peralatan dan Mesin	Rp. 3.952.472.694			
		- Gedung dan Bangunan	Rp. 723.354.230			
		- Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp. 279.859.500			
		- Aset Tetap Lainnya	Rp. 21.993.900			
		1. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah		Rp 1.863.196.000	Rp 1.795.361.250	96,36
	Tercapainya target PAD	Kegiatan :				
	Tercapainya target PBB	a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 32.178.181.000,-	Rp 338.620.000	Rp 311.318.000	91,94
	Terpenuhinya sarpras yang memadai	b. Penunjang Keberhasilan PBB dan BPHTB	239 Ds, 18 Kec	Rp 984.850.000	Rp 957.175.750	97,19
		c. Persiapan Penyerahan Pengelolaan PBB	2 Unit Server, 11 Komp, 4 unit Laptop, 13 Printer, Jaringan Komp, 1 LCD, 1 rak server	Rp 539.726.000	Rp 526.867.500	97,62

Purbalingga, Januari 2013
KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

YANUAR ABIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1 032

B. Analisis Capaian Kinerja

LAKIP tahun 2012 disusun dengan mengukur capaian indikator sasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga, dimana sasaran hanya dijabarkan hingga program, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak dilakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan. Kegiatan-kegiatan inilah yang kemudian akan menjadi isi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Setiap sasaran dan indikatornya dianggap mempunyai hubungan sebab – akibat dengan berbagai kegiatan pendukungnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya pada akhir tahun 2012, target kinerja (*performance plan*) akan dibandingkan dengan realisasinya (*performance plan*), sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Dari penilaian sendiri berdasarkan cara diatas, maka dapat disampaikan bahwa semua sasaran dengan program yang telah dijalankan berhasil dicapai dengan baik oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga. Dari ketiga program tersebut, 2 (dua) berkategori sangat baik dan 1 (satu) berkategori baik. Nilai kinerja tertinggi adalah pada program Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah yaitu 96,36 %. Kinerja program terendah adalah pada Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah yaitu 86,52 %.

Secara lengkap kinerja dari program pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah 86,52 %
- b. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 93,71 %;
- c. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah 96,36 %;

Analisis keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, maka akan dijelaskan kinerja dari masing – masing kegiatan menurut program.

1. Sasaran A : Terwujudnya analisis kemampuan daerah berdasarkan analisis pendapatan, kebutuhan dan beban kerja. serta sasaran terwujudnya pegawai yang berpengetahuan, terampil dan profesional.

Program	: Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
a. Kegiatan	: Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Output	: Terlayannya kebutuhan administrasi kantor
Outcome	: Tercukupinya administrasi kantor
Target Anggaran	: Rp. 1.091.344.000
Realisasi Anggaran	: Rp. 997.685.621
Kinerja Kegiatan	: 91.42%
b. Kegiatan	: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Output	: Terlaksananya Rakor dan Konsultasi
Ourcome	: Rakor dan Konsultasi berjalan lancar
Target Anggaran	: Rp. 137.655.000
Realisasi Anggaran	: Rp. 73.441.700
Kinerja Kegiatan	: 53,35 %
c. Kegiatan	: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Output	: Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor
Ourcome	: Meningkatnya Pelayanan /Kinerja meningkat
Target Anggaran	: Rp. 587.456.000
Realisasi Anggaran	: Rp. 506.619.900
Kinerja Kegiatan	: 86,24%
d. Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Output	: Tersedianya sarpras kantor
Ourcome	: Meningkatnya Pelayanan /Kinerja meningkat
Target Anggaran	: Rp. 164.320.000

Realisasi Anggaran	: Rp. 142.483.200
Kinerja Kegiatan	: 86,71%
e. Kegiatan	: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Output	: Terlaksananya diklat bagi pegawai
Ourcome	: Meningkatkan Sumber Daya Pegawai
Target Anggaran	: Rp. 25.000.000
Realisasi Anggaran	: Rp. 14.393.000
Kinerja Kegiatan	: 57,57%
f. Kegiatan	: Penyusunan LAKIP,LPPD,LKPJ, RENJA,RENSTRA dan LK-SKPD
Output	: Tersusunnya Laporan tepat waktu
Ourcome	: Dokumen / Buku Laporan/LAKIP/LPPD / LKPJ/RENJA/RENSTRA dan LK – SKPD
Target Anggaran	: Rp. 5.200.000
Realisasi Anggaran	: Rp. 5.199.000
Kinerja Kegiatan	: 99,98%

2. Sasaran B : Terwujudnya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur pelayanan administrasi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal,tersusunnya bahan laporan keuangan daerah serta terkendalinya sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah

Program	: Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
a. Kegiatan	: Penyusunan APBD
Output	: Tersusunnya Buku APBD
Outcome	: Penyusunan APBD sesuai ketentuan
Target Anggaran	: Rp. 268.072.000
Realisasi Anggaran	: Rp. 262.246.150
Kinerja Kegiatan	: 97,83%
b. Kegiatan	: Penyusunan Perubahan APBD

Output	: Tersusunnya Buku Perubahan APBD
Outcome	: Penyusunan Perubahan APBD sesuai ketentuan
Target Anggaran	: Rp. 258.060.000
Realisasi Anggaran	: Rp. 255.304.000
Kinerja Kegiatan	: 98,93%
c. Kegiatan	: Penyusunan Sistem Prosedur Tata Usaha Keuangan
Output	: Tersusun Buku Tata Usaha Keuangan
Outcome	: Ketaatan Pelaksanaan Keuangan sesuai aturan meningkat
Target Anggaran	: Rp. 42.500.000
Realisasi Anggaran	: Rp. 37.332.200
Kinerja Kegiatan	: 87,84%
d. Kegiatan	: Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah
Output	: Terlaksananya pelayanan keuangan kepada SKPD
Outcome	: Pengelolaan keuangan optimal
Target Anggaran	: Rp. 237.964.000
Realisasi Anggaran	: Rp. 236.661.500
Kinerja Kegiatan	: 99,45%
e. Kegiatan	: Fasilitasi Kegiatan Perimbangan Keuangan Daerah
Output	: Tersalurkannya Dana Perimbangan Keuangan Daerah
Outcome	: Kegiatan Perimbangan Keuangan Daerah
Target Anggaran	: Rp. 80.714.000
Realisasi Anggaran	: Rp. 76.535.000
Kinerja Kegiatan	: 94,82%
f. Kegiatan	: Pembinaan Berkala Bendahara Daerah
Output	: Terlaksananya Pembinaan Bendahara
Outcome	: SDM Bendahara meningkat
Target Anggaran	: Rp. 38.045.000
Realisasi Anggaran	: Rp. 34.715.500
Kinerja Kegiatan	: 91,25%

- g. Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
 Output : Terlaksananya Bintek bagi PPK dan Staf Administrasi SKPD
 Outcome : Pembuatan Laporan Keuangan SKPD lancar.
 Target Anggaran : Rp. 337.041.000
 Realisasi Anggaran : Rp. 328.674.900
 Kinerja Kegiatan : 97,52%
- h. Kegiatan : Pengelolaan Aset Daerah
 Output : Terkelolanya aset daerah
 Outcome : Tertib Administrasi pengelolaan barang daerah
 Target Anggaran : Rp. 956.435.000
 Realisasi Anggaran : Rp. 849.003.777
 Kinerja Kegiatan : 88,77%
- i. Kegiatan : Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah
 Output : Terdidiknya SDM sejumlah 329 orang
 Outcome : Meningkatnya kualitas SDM dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah
 Target Anggaran : Rp. 45.870.000
 Realisasi Anggaran : Rp. 41.773.500
 Kinerja Kegiatan : 91,07%

3.Sasaran C : Terwujudnya kesederhanaan prosedur pelayanan administrasi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset secara mudah, lancar dan tepat sasaran

- Program : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
- a. Kegiatan : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Output : Tersenggaranya Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
 Outcome : PAD Meningkat
 Target Anggaran : Rp. 338.620.000
 Realisasi Anggaran : Rp. 311.318.000
 Kinerja Kegiatan : 91,94%

b. Kegiatan : Penunjang Keberhasilan PBB dan BPHTB
Output : Terlaksananya Pemungutan PBB yang intensif
Outcome : Target Pendapatan PBB dan BPHTB terpenuhi
Target Anggaran : Rp. 984.850.000
Realisasi Anggaran : Rp. 957.175.750
Kinerja Kegiatan : 97,19%

c. Kegiatan : Persiapan Penyerahan Pengelolaan PBB
Output : Terpenuhinya Sarpras Kantor Yang memadai
Outcome : Lancarnya pelayanan Administrasi perkantoran
Target Anggaran : Rp. 539.726.000
Realisasi Anggaran : Rp. 526.867.500
Kinerja Kegiatan : 97,62 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terlepas dari berbagai semua kesulitan dan hambatan yang ada, dengan cara pengukuran kinerja ini, maka pada tahun 2012 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga membukukan kinerja kuantitatif dari 3 sasaran dengan total kegiatan sebanyak 18 kegiatan maka ditetapkan sebesar 92,16%. Ditinjau dari katagorisasi yang ditetapkan, maka capaian kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga tersebut adalah **SANGAT BAIK**. Secara rata – rata keseluruhan nilai kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga berada di atas 90 %, kecuali untuk Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah yang nilainya hanya 86,52%.. Namun secara keseluruhan kinerja dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga sudah bisa dikatakan **SANGAT BAIK**. Dilihat menurut kegiatan maka kinerja kegiatan yang paling bagus atau dengan predikat sangat baik adalah kegiatan Penyusunan LAKIP,LKPJ,RENJA,RENSTRA DAN LK-SKPD yang mencapai kinerja kegiatan sampai sebesar 99,98%.

Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun – tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam Perencanaan serta Program Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga, dengan sumber dana dari APBD yang merupakan kristalisasi dari prioritas – prioritas dan pencapaian – pencapaian yang harus fiwujudkan setiap tahunnya.

B.Saran

Beberapa kekurangan seperti kesesuaian antara penyelesaian Anggaran dengan fisik kegiatan seharusnya tetap dijadikan acuan dalam menentukan kinerja dimasa mendatang, sehingga apa yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga, bisa selalu dipedomani untuk panduan langkah selanjutnya.



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)**

**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
2012**

